



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ENDE TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ende Tahun 2012, antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Ende, terdapat penambahan kegiatan yang sangat penting dan mendesak, sehingga disepakati untuk ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ende Tahun 2012;
- b. bahwa dari evaluasi hasil rencana atau perkembangan pelaksanaan APBD Kabupaten Ende Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian rencana kegiatan dengan keadaan terkini;
- c. bahwa dalam rangka menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Ende Tahun 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1a

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2012, adalah Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penyesuaian atas Dokumen RKPD 2012,
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 4 (empat) Bab dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Evaluasi Hasil RKPD
 - c. Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - d. Bab IV Penutup
- (3) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (4) Perubahan RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R- PAPBD) Tahun Anggaran 2012.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Oktober 2012



BUPATI ENDE, *[Signature]*

DON BOSCO M. WANGGE *[Signature]*

Diundangkan di Ende
pada tanggal 2 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, *[Signature]*



JOSEPH ANSAR RERA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN RKPD

Pelaksanaan APBD yang penyusunannya dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan, serta didasarkan pada asumsi-asumsi, tentunya tidak terlepas dari realitas perkembangan dan/atau perubahan, sehingga memerlukan perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Penyesuaian tersebut secara legal formal disebut Perubahan APBD. Perubahan APBD pada tataran formal praktis dilaksanakan dalam rangka mengintegrasikan APBD, yang dalam konteks perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Secara normatif Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Selain itu dalam tataran perencanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Sehingga untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan APBD harus didahului dengan Perubahan RKPD dan Perubahan dalam KUA dan PPAS.

Ketentuan Pasal 285 Permendagri 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang meliputi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada perkembangan pelaksanaan APBD Kabupaten Ende tahun 2012, yang diperoleh dari evaluasi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi, teridentifikasi hal-hal yang menjadi pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Ende antara lain :

1. Adanya kegiatan baru yang ditampung dalam APBD sebagai hasil perkembangan pembahasan APBD 2012 yang dipandang mendesak dan penting yang belum ditampung dalam RKPD khususnya berkaitan dengan perubahan lokasi dan sasaran,

- sehingga memengaruhi realisasi capaian APBD;
2. Adanya pergeseran kegiatan antar SKPD,
 3. Perlunya penyesuaian terhadap asumsi kerangka ekonomi daerah sebagai akibat perkembangan perekonomian
 4. Adanya SiLPA yang harus digunakan untuk menghindari dana menganggur, yang harus dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi capaian sasaran.

Dalam konteks pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD secara umum tidak mengalami perubahan. Konteks perubahan lebih diarahkan pada penyesuaian-penyesuaian atas perubahan dan perkembangan dinamika perkembangan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan perubahan regulasi yang terjadi.

Perubahan RPKD Kabupaten Ende Tahun 2012 yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KU APBD dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2012, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan umum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2012 adalah tersedianya dokumen yang dijadikan acuan dalam penyusunan KU Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

1.3. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI

1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian kabupaten Ende secara umum sampai tahun 2011 diperkirakan terus mengalami peningkatan, dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sampai pada angka Rp 2.047.994.356.000,- dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) pada angka Rp 837.226.742.000,-.

Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 15,22 %, diproyeksikan PDRB ADHB mencapai Rp 2,19 Trilyun pada tahun 2012; sedangkan untuk PDRB ADHK dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,36 %, diperkirakan mencapai angka Rp 873 Miliard pada tahun 2012.

Tabel 1.1.
PDRB Kabupaten Ende Tahun 2007-2011 dan Perkiraan Tahun 2012
(dalam ribuan rupiah)

NO	PDRB	2007	2008	2009	2010*)	2011**)	Rata-rata Pertumbuhan	Perkiraan 2012
1	ADHB	1.160.343.550	1.338.652.630	1.511.434.720	1.709.643.860	2.047.994.356	15,22 %	2.196.859.359
2	ADHK	705.725.950	721.013.220	757.036.770	795.213.730	837.226.742	4,36 %	873.765.399

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Ende dan Data Olahan (Perhitungan Rata2 Pertumbuhan : Metode Rata-rata Geometrik)

2. Pertumbuhan Ekonomi

Data statistik menunjukkan bahwa meskipun bergerak lambat, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan pada 3 (tiga) tahun terakhir, setelah menurun tajam pada tahun 2008. Data trend pertumbuhan ekonomi kabupaten Ende menunjukkan pertumbuhan pada angka 5,60 persen pada tahun 2007, menurun secara significant pada tahun 2008 menjadi 4,82 persen. Namun kembali meningkat secara perlahan pada angka 5,00 pada tahun pada tahun 2009, kemudian menjadi 5,04 persen pada tahun 2010, dan terakhir pada tahun 2011 diproyeksikan pada angka 5,28 persen.

Dari data laju pertumbuhan per sektor diperkirakan perlambatan kenaikan laju disebabkan menurunkan pertumbuhan **sub sektor pemerintahan umum** secara significant dari keadaan 8,17 persen pada tahun 2009 menjadi 7,73 persen pada perkiraan angka sementara tahun 2011. Hal ini memengaruhi laju pertumbuhan secara keseluruhan mengingat sub sektor ini memberikan kontribusi cukup significant bagi proporsi ekonomi Kabupaten Ende yaitu sekitar 17 persen.

Tabel 1.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Ende 2009- 2011

LAPANGAN USAHA	2009	2010*)	2011**)
1. PERTANIAN	3,51	3,67	3,64
a. Tanaman Bahan Makanan	2,53	2,70	2,71
b. Tanaman Perkebunan	4,75	5,04	4,91
c. Peternakan	3,22	3,26	3,27
d. Kehutanan	4,92	2,03	1,51
e. Perikanan	4,19	4,33	4,29
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3,69	3,75	3,79
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3,61	2,93	2,98
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	6,78	7,60	9,14
a. Listrik	8,81	9,59	11,14
b. Air Minum	1,72	2,28	3,44
5. BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	3,31	0,99	3,88
6. PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	5,68	5,71	5,77
a. Perdagangan Besar dan Eceran	5,67	5,71	5,76
b. H o t e l	10,19	10,34	10,45
c. Restoran / Rumah Makan	3,96	3,80	3,84
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	6,18	6,83	7,34
a. A n g k u t a n	5,62	6,17	6,75
1). Pengangkutan Jalan Raya	5,18	5,74	5,79
2). Pengangkutan Laut	6,55	7,14	23,18
3). Angkutan Sungai dan Danau	4,01	3,90	2,66
4). Pengangkutan Udara	14,82	15,40	15,55
5). Jasa Penunjang Angkutan	5,55	5,87	5,93
b. Komunikasi (Telkom + Pos dan Giro)	8,84	9,89	9,99
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	6,03	6,42	8,27
a. B a n k	7,55	8,18	9,59
b. Lembaga Keuangan Nir Bank	5,76	5,96	8,53
c. Sewa Bangunan / Rumah	4,33	4,61	6,54

d. Jasa Perusahaan	4,60	3,56	4,59
9. J A S A J A S A	6,91	7,19	6,68
a. Pemerintahan Umum	8,17	8,52	7,73
b. S w a s t a	3,91	3,90	3,97
1). Sosial Kemasyarakatan	5,89	5,97	6,03
2). Hiburan dan Rekreasi	4,84	4,73	4,78
3). Perorangan dan Rumah Tangga	2,17	2,00	2,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,00	5,04	5,28

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara
Sumber : Ende Dalam Angka 2012

3. Laju Inflasi

Kondisi riil menunjukan bahwa inflasi tahun kalender (Pebruari 2012) adalah sebesar 1,11 persen, dengan laju inflasi 'year on year' (Pebruari 2012 terhadap Pebruari 2011) sebesar 3,78 persen (*Berita Resmi Statistik Kabupaten Ende Nomor 03/03/Th.IX Publikasi Maret 2012*). Perkiraan sampai akhir tahun 2012 tingkat inflasi Kabupaten Ende pada keadaan dibawah 5 persen, dengan asumsi tidak ada kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada gejolak perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat (*misalnya kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik*).

4. Struktur PDRB

a) Pendekatan Produksi (sisi penawaran) :

Struktur PDRB di Kabupaten Ende berdasarkan pendekatan produksi masih didominasi **Sektor Pertanian**, diikuti **Perdagangan, Hotel dan Restaurant**, dan sektor **Jasa-Jasa**. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi sebesar 80,47 persen pada perekonomian Kabupaten Ende. Secara sub sektor, **perdagangan besar dan eceran** pada komponen Sektor Perdagangan, Hotel dan Restaurant merupakan yang terbesar, diikuti sub sektor **pemerintahan umum** pada sektor jasa.

Sub sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi, pada angka 21,92 persen pada keadaan 2009, kemudian meningkat menjadi 22,53 persen, dan terakhir proyeksi angka sangat sementara keadaan 2011 meningkat tajam sampai angka 26,50 persen. Secara khusus untuk sektor pertanian, didominasi oleh **sub sektor tanaman bahan makanan** dengan kontribusi sebesar 11,65 persen. Sub sektor lainnya seperti perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi pada kisaran di bawah 10 pesen.

Tabel 1.3
Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2009 – 2011

LAPANGAN USAHA	2009	2010*)	2011**)
1. PERTANIAN	34,37	33,56	31,51
a. Tanaman Bahan Makanan	12,79	12,51	11,65
b. Tanaman Perkebunan	8,02	7,86	7,41
c. Peternakan	5,40	5,16	4,78
d. Kehutanan	0,15	0,15	0,14
e. Perikanan	8,01	7,87	7,52

LAPANGAN USAHA	2009	2010*)	2011**)
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1,38	1,39	1,31
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1,65	1,66	1,56
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	0,48	0,49	0,46
a. Listrik	0,35	0,36	0,35
b. Air Minum	0,14	0,13	0,11
5. BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	7,00	6,96	6,46
6. PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	22,21	22,82	26,77
a. Perdagangan Besar dan Eceran	21,92	22,53	26,50
b. Hotel	0,08	0,08	0,08
c. Restoran / Rumah Makan	0,21	0,21	0,20
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	6,00	5,71	5,09
a. Angkutan	4,81	4,54	4,03
1). Pengangkutan Jalan Raya	3,56	3,30	2,90
2). Pengangkutan Laut	0,16	0,15	0,14
3). Angkutan Sungai dan Danau	0,23	0,22	0,18
4). Pengangkutan Udara	0,34	0,36	0,35
5). Jasa Penunjang Angkutan	0,53	0,51	0,47
b. Komunikasi (Telkom + Pos dan Giro)	1,19	1,17	1,06
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	4,69	4,81	4,65
a. Bank	2,46	2,59	2,58
b. Lembaga Keuangan Nir Bank	0,82	0,87	0,84
c. Sewa Bangunan / Rumah	1,21	1,17	1,08
d. Jasa Perusahaan	0,19	0,19	0,16
9. JASA - JASA	22,22	22,61	22,19
a. Pemerintahan Umum	17,15	17,58	17,46
b. Swasta	5,07	5,02	4,73
1). Sosial Kemasyarakatan	2,75	2,86	2,80
2). Hiburan dan Rekreasi	0,00	0,00	0,00
3). Perorangan dan Rumah Tangga	2,31	2,16	1,92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara
 Sumber : Ende Dalam Angka 2012

b) Pendekatan Penggunaan (permintaan) :

Data menunjukan bahwa berdasarkan pendekatan penggunaan, tampak bahwa sebagian besar produk yang dikomsumsi di wilayah Kabupaten Ende masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan komsumsi akhir rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (51,67 persen) diikuti impor (33,42 persen) dan komsumsi pemerintah (28,47 persen) .

Tabel 1.4
 Distribusi PDRB Penggunaan Ende Atas Dasar Harga Berlaku,
 Tahun 2008 – 2010

Jenis Penggunaan	Tahun		
	2008	2009*)	2010**)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba	55,85	54,23	51,67
2. Konsumsi Pemerintah	26,14	27,72	28,47
3. PMTB	17,83	17,51	17,43
4 Ekspor	14,97	15,10	15,13
5. Impor (-)	33,29	33,90	33,42
6. Perubahan Stok/Inventori	18,50	19,35	20,72
PDRB	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) angka sementara
**) angka sangat sementara

5. Investasi dan Perdagangan Daerah

Nilai investasi yang digambarkan oleh komponen pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok/inventori pada kurun tahun 2008-2010 memperlihatkan kecenderungan meningkat. Jika pada tahun 2008 investasi hanya sebesar 486,4 milyar rupiah, tahun 2009 meningkat sebesar 14,23 persen menjadi 555,6 miliyad rupiah, dan terus meningkat sebesar 17,12 persen menjadi sebesar 650,7 miliyad rupiah.

Nilai Investasi dan perubahan stok/inventori Kabupaten Ende pada tahun 2010 sebesar 650,7 milyar rupiah sedangkan provinsi NTT telah mencapai 6.466,5 milyar rupiah atau dengan kata lain nilai investasi dan perubahan stok/inventori kabupaten ini hanya sebesar 10,06 persen dari nilai investasi dan perubahan stok/inventori yang terjadi di provinsi ini.

Sementara itu neraca perdagangan Kabupaten Ende dari tahun 2008 hingga tahun 2010 mempunyai nilai negatif. Hal ini menggambarkan bahwa nilai impor Kabupaten Ende masih lebih besar dibanding nilai ekspornya, dengan pernyataan lain barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah lebih banyak dibanding yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Ende. Pada tahun 2008 neraca perdagangan Kabupaten Ende minus 245,2 milyar rupiah kemudian pada tahun 2009 meningkat sebesar 15,56 persen sehingga menjadi minus 83,4milyar rupiah, dan berlanjut pada tahun 2010 meningkat lagi sebesar 10,10 persen sehingga menjadi minus 312,0 milyar rupiah.

Nilai Ekspor Netto Kabupaten Ende pada tahun 2010 sebesar minus 312,0 milyar rupiah sedangkan provinsi NTT pada tahun yang sama telah mencapai minus 5.551,6 milyar rupiah atau dengan kata lain nilai Investasi dan perubahan stok/inventori kabupaten ini hanya sebesar 5,62 persen.

Tabel 1.5
PDRB Penggunaan Ende Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2008 – 2010

Jenis Pengeluaran	Kab Ende			NTT		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Konsumsi (RT+ LNPRT+ Pemerintah)	1.097,5	1.235,3	1.366,8	20.777,3	23.214,7	26.796,4
Investasi (PMTB+PerubahanStok/Inventori)	486,4	555,6	650,7	4.656,3	5.166,1	6.466,5
Ekspor Neto	-245,2	-283,4	-312,0	-3.777,6	-4.201,4	-5.551,6
PDRB	1.338,7	1.507,4	1.705,4	21.655,9	24.179,4	27.711,2

Sumber : PDRB Penggunaan Kab. Ende 2008-2010

Diperkirakan investasi di Kabupaten Ende sampai Tahun 2012 akan terus meningkat, sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan upaya peningkatan iklim invetasi dan usaha, sebagai isu pokok RKP Tahun 2013 dan optimalisasi pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan terpadu satu pintu, dan promosi potensi ekonomi daerah.

6. Penduduk Miskin

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut di atas maka diperoleh jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende seperti yang disajikan pada Tabel 3.6. Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende pada periode 2005-2010 cenderung meningkat, yaitu dari sekitar 47,4 ribu orang atau 20,09 persen pada tahun 2005 menjadi 56,4 ribu orang atau 21,65 persen terhadap total penduduk di tahun 2010.

Tabel 1.6.
Tabel Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2005-2010

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.000/kap/bulan	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2005	99,2	47,4	20,09
2006	113,1	53,2	22,43
2007	122,7	46	20,33
2008	156,7	57,5	24,87
2009	182,8	51,7	23,01
2010	206,9	56,4	21,65

Sumber : BPS, Susenas

Dengan target penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen setiap tahunnya dengan pertumbuhan penduduk diasumsikan tetap, diperkirakan pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende dapat dikurangi sebesar 2 persen atau sebanyak 5.192 jiwa dari keadaan 56.400 jiwa pada tahun 2010 atau menjadi sebesar 51.209 jiwa (*angka kemiskinan diturunkan dari 21,65 persen menjadi 19,65 persen*).

Dengan asumsi rata-rata anggota keluarga per KK sebanyak 5 (lima) orang berarti perlu penanganan kepada 1.039 KK sampai dengan tahun 2012. Optimisme ini diharapkan dicapai melalui sinergi program penanggulangan kemiskinan pusat yang dilaksanakan di daerah dan pelaksanaan program inisiatif daerah untuk pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ekonomi produktif dan peningkatan ketahanan pangan daerah, seperti program DEMAM dan replikasinya.

7. Angkatan Kerja

Informasi mengenai angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka dapat dilihat pada Tabel 3.7. yang menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ende pada Agustus 2010 mencapai 130.044 orang, yang menurut jenis kelamin, angkatan kerja perempuan berjumlah 67.061 orang (51,58 persen) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja laki-laki yaitu 62.973 orang (48,42 persen).

Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja pada Agustus 2010 sebanyak 126.710 orang atau sekitar 97,44 persen meningkat dari tahun 2009 sebesar 96,15 persen angkatan kerja yang bekerja. Dari jumlah penduduk yang bekerja, bila dibedakan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk perempuan.

Penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 66. 065 orang (52,10 persen), sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 60.645 orang (47,90 persen). Tingginya jumlah penduduk perempuan yang bekerja diakibatkan semakin terbukanya kesempatan kerja pada kaum perempuan seperti industri pengolahan dan perdagangan, disamping dorongan ekonomi untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Tabel 1.7.
Tabel Angkatan Kerja dan Penduduk Usia kerja di Kabupaten Ende tahun 2009-2010

No	Kegiatan selama Seminggu yang lalu	2009		2010	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Angkatan Kerja	64.502	66.104	62.973	67.071
	Bekerja	62.118	63.457	60.645	66.065
	Pengangguran	2.384	2.647	2.328	1.006
2	Bukan Angkatan Kerja	15.609	30.968	15.530	27.768
	Sekolah	8.703	8.808	8.960	8.167
	Mengurus Rumah tangga	1.419	19.347	2.214	16.335
	Lainnya	5.487	2.813	4.356	3.266
	TOTAL (1+2)	80.111	97.072	78.503	94.839
	% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	96,30	95,99	96,30	98,50
	Tingkat Pengangguran	3,70	4,00	3,70	1,50
	% Angkatan kerja terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)	92,47	77,76	80,22	70,72

Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende tahun 2011 (BPS Ende)
Berdasarkan publikasi Keadaan Angkatan kerja di Prov NTT Agustus 2009/2010

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja yang terjun ke pasar kerja (sebagai pekerja atau pencari kerja/penganggur) terhadap total penduduk usia kerja. Berdasarkan informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas terlihat bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun terakhir dalam angkatan kerja selama periode 2009 - 2010 mengalami penurunan, yakni dari 74,39 persen pada tahun 2009 menjadi 75,02 persen pada tahun 2010. Data sakernas juga menginformasikan bahwa penduduk laki-laki lebih tinggi partisipasinya dalam kegiatan ekonomi dibandingkan penduduk perempuan. Lebih tingginya TPAK laki-laki tampaknya berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga.

Secara khusus berdasarkan Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2009 & 2010 dan Sakernas 2009/2010 menunjukkan bahwa **Pengangguran Terbuka** di Kabupaten Ende cenderung fluktuatif yakni dari 3,14 persen pada tahun 2008, meningkat pada tahun 2009 menjadi 3,85 persen, kembali menurun menjadi 2,56 persen pada tahun 2010.

Tabel 1.8.
Tabel Partisipasi Angkatan kerja dan Angka pengangguran terbuka Tahun 2008-2010

Jenis kelamin	Partisipasi Angkatan kerja			Angka Pengangguran Terbuka		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Laki-laki	79,98	92,47	80,22	2,14	3,70	3,70
Perempuan	72,28	77,76	70,72	4,05	4,00	1,50
Jumlah	75,76	84,39	75,02	3,14	3,85	2,56

Sejalan dengan percepatan pelaksanaan MP3EI dan MP3KI yang saling memperkuat dan melengkapi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang *pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment*, diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang tentunya akan berimplikasi pada pembukaan kesempatan kerja baru dan penurunan angka pengangguran.

8. Pendapatan Regional

▪ PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Ende 3 (tiga) tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Data menunjukkan pada tahun 2009 pada angka Rp 5.852.331-

menjadi Rp 6.560.000,- pada tahun 2010 dan diperkirakan pada angka Rp 7.706.151,- pada keadaan tahun 2011.

Sejalan dengan PDRB diperkirakan **Pendapatan per kapita** juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 pendapatan per kapita Kabupaten Ende adalah sebesar Rp 5.543.192, meningkat menjadi sekitar Rp 6.201.479 pada tahun 2010 dan diperkirakan mencapai Rp 7.292.945 pada angka sangat sementara tahun 2011.

Berdasarkan trend data dan perkiraan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian jumlah kelahiran, diharapkan akan terjadi peningkatan pula pada PDRB dan Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Ende pada tahun 2012.

Tabel 1.9
Pendapatan Regional dan Perkapita Kab. Ende Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2009 – 2011

PERINCIAN	2009	2010*)	2011**)
01. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar (Ribuan Rupiah)	1 511 434 720	1 709 643 860	2 047 994 356
02. Dikurangi Penyusutan Barang-barang Modal (Ribuan Rupiah)	67 391 040	78 965 344	92 670 910
03. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar (Ribuan Rupiah)	1 444 043 680	1 630 678 516	1 955 323 446
04. Dikurangi Pajak Tak Langsung Netto (Ribuan Rupiah)	12 447 816	14 542 208	17 143 079
05. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor = Pendapatan Regional (Ribuan Rupiah)	1 431 595 864	1 616 136 308	1 938 180 367
06. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Orang)	258 262	260 605	265 761
07. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar Per Kapita (Rupiah)	5 852 331	6 560 288	7 706 151
08. Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	5 543 192	6 201 479	7 292 945

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

▪ *Rata-rata Pengeluaran dan Distribusi Pendapatan*

Data Inkesra Tahun 2010 yang dipublikasikan BPS menunjukkan bahwa selama periode 2004 -2007, 2009-2010, rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 65,68 persen tahun 2004, 64,73 persen tahun 2005, 62,1 persen tahun 2006 meningkat menjadi 66,24 persen pada tahun 2007 dan kembali menurun menjadi 61,35 persen pada tahun 2009,dan 61,33 persen pada tahun 2010. Sebaliknya rata-rata pengeluaran kelompok bukan makanan cenderung meningkat dari dengan trend 34,32 pada tahun 2004, 35,27 pada tahun 2005, 37,90 pada tahun 2006, menurun menjadi 33,76 pada tahun 2007 dan meningkat kembali menjadi 38,65 persen tahun 2009 dan 38,67 persen tahun 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di kabupaten Ende terus meningkat.

Dari sisi distribusi menunjukkan masih adanya ketimpangan antar wilayah perdesaan dan perkotaan. Dari publikasi terakhir Indikator Ekonomi 2007

tampak bahwa pada tahun 2007 di daerah perkotaan cenderung lebih sejahtera dibanding daerah perdesaan. Data menunjukkan bahwa perbandingan pengeluaran bukan makanan untuk daerah perkotaan sebesar 42,10 persen, sedangkan perdesaan sebesar 28,48 persen. Begitupun sebaliknya untuk pengeluaran makanan perbandingan 57,90 persen untuk perkotaan dan 71,52 persen untuk perdesaan.

Diperkirakan pada tahun 2011 dan 2012 kondisi distribusi pendapatan, belum mengalami pergeseran, sehingga masih merupakan permasalahan. Hal ini disebabkan karena realitas masih rendahnya kegiatan ekonomi masyarakat di perdesaan, serta masih belum optimalnya upaya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kecamatan

BAB II EVALUASI RKPD

Sesuai ketentuan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka ruang lingkup pengendalian dan evaluasi RKPD meliputi *pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana serta evaluasi terhadap hasil rencana* pembangunan daerah.

Adapun gambaran pengendalian dan evaluasi RKPD adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Evaluasi KEBIJAKAN PERENCANAAN

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN
		ADA	TIDAK ADA		
1	Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja.	Ö		Hanya secara internal Bappeda namun dalam penyusunannya telah melibatkan Kepala SKPD sesuai kebutuhan	Akan dilakukan penyempurnaan berkaitan dengan susunan tim penyusun dengan melibatkan beberapa SKPD sesuai kebutuhan (SKPD terkait Program Prioritas)
2	Pengolahan data dan informasi.	Ö		Dilaksanakan secara baik meskipun beberapa data belum lengkap sesuai yang dipersyaratkan dalam permendagri No. 54 thn 2010. Namun dari data yg ditampilkan tergolong akurat dan valid karena ketersediaan data disupport dari sumber-sumber data yg berkompeten dan update	Konsolidasi data dan informasi akan dibuat lebih lengkap sesuai persyaratan Permendagri No.54 thn 2010, dan diarahkan sesuai dengankebutuhan data perencanaan diperkuat antarlain dengan penyiapan data dan informasi perencanaan
3	Analisis gambaran umum kondisi daerah	Ö		Dilaksanakan secara baik meskipun beberapa data belum lengkap sesuai permendagri No. 54 thn 2010. Namun dari data yg ditampilkan tergolong akurat dan valid karena ketersediaan data disupport dari sumber-sumber data yg berkompeten dan update	Konsolidasi data dan informasi akan dibuat lebih lengkap sesuai persyaratan Permendagri No.54 thn 2010, dan diarahkan sesuai dengankebutuhan data perencanaan
4	Analisis ekonomi dan keuangan daerah.	Ö		Dilaksanakan secara baik	ke depannya akan lebih dipertajam dengan meningkatkan koordinasi dalam penyusunan asumsi dan proyeksi sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan
5	Evaluasi kinerja tahun lalu.	Ö			Mengacu data LKPJ dengan berpedoman pada dokumen RPJMD (dalam kaitan dengan Indikator kinerja)
6	Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah.	Ö		Penyusunan RKPD telah memperhatikan kebijakan Pemerintah dan Pemprov NTT	Kedepan akan lebih dipertajam terutama kaitannya dengan penetapan prioritas dan sasaran pembangunan, sesuai ketentuan sinkronisasi program nasional dan daerah
7	Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota.	Ö		dilakukan namun tidak dalam mekanisme surat permintaan, tetapi dengan memperhatikan masukan berbagai risalah rapat, reses-reses	Untuk ke depan akan diintegrasikan hasil RESES dalam penyusunan rancangan RKPD

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN
		ADA	TIDAK ADA		
8	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota.	0		Dilakukan, namun belum dilaksanakan secara baik dan terintegrasi	Perlu Penajaman, dengan melibatkan TIM dan dilakukan melalui kajian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
9	Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.	0			
10	Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/walikota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota.	0			
11	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.	0		Dilakukan, namun belum dilaksanakan secara baik	Perlu Penajaman, dengan melibatkan TIM dan dilakukan melalui kajian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
12	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	0			Perlu Penajaman, dengan melibatkan TIM dan dilakukan melalui kajian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
13	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP.	0			Perlu Penajaman, dengan melibatkan TIM dan dilakukan melalui kajian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
14	Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.		0	Dilakukan, namun belum dilaksanakan secara baik	Akan dilakukan untuk perencanaan, berdasarkan perencanaan partisipatif dengan melibatkan TIM Penyusun bersama SKPD yang berkompeten
15	Pelaksanaan forum konsultasi publik		0	Belum dilaksanakan	Dilaksanakan untuk Perencanaan ke depan dalam rangka keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam penyusunan RKPD
16	Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.		0	Belum dilaksanakan	Akan dilakukan untuk perencanaan, berdasarkan perencanaan partisipatif dengan melibatkan TIM Penyusun bersama SKPD yang berkompeten
17	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum.	0		dilaksanakan namun belum disertakan dengan kebijakan pendanaan indikatif	Perlu Penajaman dalam perencanaan, berdasarkan integrasi 3 komponen perencanaan yaitu perencanaan partisipatif, perencanaan politis dan perencanaan teknokratis melalui mekanisme musrenbang secara berjenjang
18	Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahunan Kabupaten/Kota telah berpedoman pada Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota	0			
19	Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahunan Kabupaten/Kota telah mengacu pada RKP	0			
20	Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota	0			

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN
		ADA	TIDAK ADA		
21	Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (Provinsi)	0			
22	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.	0			
23	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju.		0		Akan dilakukan untuk perencanaan, berdasarkan perencanaan partisipatif dengan melibatkan TIM Penyusun bersama SKPD yang berkompeten
24	Musrenbang RKPD yang bertujuan :				
24.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.	0		Belum dilakukan secara baik dan belum terintegrasi	Sudah mulai dilaksanakan pada Musrenbang 2012 baru-baru ini dengan mekanisme pengintegrasian.
24.b.	Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan.	0		Belum dilakukan secara baik	ke depan akan dilakukan Perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan Musrenbang (sesuai ketentuan Permendagri 54 dan penyiapan Peraturan bupati berkaitan dengan Tatacara Musrenbang) dan hal ini sudah dilaksanakan terkait pelaksanaan Musrenbang Tahun 2012 dan Penyusunan RKPD Tahun 2013 yang sekarang sedang dilaksanakan.
24.c.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.		0		
24.d.	Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.		0		
25	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD.	0		telah dilaksanakan secara baik dan dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan hasil Musrenbang. Terbatas pada rekapitulasi Hasil Musrenbang	Perlu dimatangkan Rancangan RKPD, terutama berkaitan dengan kemampuan pendanaan (PAGU INDIKATIF)
26	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	0		dilaksanakan secara baik dan melalui tahapan yang dipersyaratkan	Perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan Musrenbang (sesuai ketentuan Permendagri 54 dan penyiapan Peraturan Bupati berkaitan dengan Tatacara Musrenbang)
27	Dokumen RKPD yang telah disyahkan.	0		dilaksanakan dengan baik melalui penetapan PERBUP	Dilakukan Melalui Penetapan PERATURAN BUPATI Ende Nomor 15 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2011

2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

RKPD	APBD DAN LAPORAN TRIWULAN	KESESUAIAN		EVALUASI PENYEBAB /TINDAK LANJUT
		YA	TIDAK	
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN RKPD	KUA	v		MESKIPUN SAMA, NAMUN SESUNGGUHNYA BELUM DIBAHAS SECARA INTENSIF. HAL INI MENYEBABKAN PENENTUAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TIDAK DAPAT DILAKUKAN SECARA BAIK SEHINGGA SANGAT BERPENGARUH PADA PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF	PPAS		v	1.PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD BELUM DILAKUKAN SECARA BAIK (HAMPIR SELURUH USULAN MUSRENBANG DIMASUKAN DALAM RKPD) 2.PAGU INDIKATIF DALAM RKPD BELUM MEMPERHATIKAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH RIIL, SEHINGGA PADA TAHAPAN PENGANGGARAN HARUS DILAKUKAN PENGURANGAN PROGRAM/KEGIATAN AKIBAT KETERBATASAN ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN SELURUH RENJA SKPD	RKA SKPD			SEBAGIAN BESAR SKPD TIDAK MENYUSUN RENJA. USULAN KEGIATAN DISAMPAIKAN HANYA DENGAN DAFTAR USULAN
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD	INFORMASI KUA/PPAS	v		NAMUN TERBATAS PADA HAL UMUM BERKAITAN DENGAN KEBIJAKAN BELANJA
	PEMILAHAN PROGRAM/ KEGIATAN	v		SESUAI, SEMUA URUSAN SUDAH DITERJEMAHAKAN SESUAI SKPD BERKENAAN
	TARGET KINERJA		v	TIDAK DISAMPAIKAN TARGET KINERJA . KHUSUS UNTUK TARGET KINERJA SECARA KESELURUHAN BELUM DILAKUKAN SECARA BAIK DAN BENAR
	PLAFON ANGGARAN	v		DISAMPAIKAN MELALUI PENYAMPAIAN OELH KETUA TAPD SESUAI KESEPAKATAN DALAM PPAS KEPADA SELURUH SKPD

3. Evaluasi Hasil Rencana

Evaluasi hasil rencana merupakan evaluasi hasil pelaksanaan APBD yang dalam konteks perencanaan merupakan HASIL rencana. Dari evaluasi sampai semester pertama (keadaan 31 Juli 2012) diperoleh bahwa realisasi Belanja Langsung adalah sebesar 12,58 .persen dan Belanja Tidak langsung adalah sebesar 19,77 persen.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PERUBAHAN RKPD

Sejalan dengan pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2012 maka uraian Rencana program dan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran dan Penambahan Target/Pagu SKPD

PROGRAM / KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	108.315.487.000	108.715.487.000	400.000.000
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.994.513.950	4.004.013.950	9.500.000
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.200.000	72.200.000	(8.000.000)
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	53.400.000	55.400.000	2.000.000
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	476.503.475	484.003.475	7.500.000
	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	45.000.000	53.000.000	8.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	539.050.000	555.050.000	16.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor		8.000.000	8.000.000
	Pengadaan Genset untuk UPTD Detukeli dan Ndona Timur	-	5.000.000	5.000.000
	Sewa Gedung UPTD Ndona	-	3.000.000	3.000.000
VI	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	409.927.500	404.597.500	(5.330.000)
	1 Fasilitasi Aksi Bakti Kepemudaan	44.577.500	-	(44.577.500)
	Pemberian Penyuluhan ttg bahaya narkoba dan HIV/AIDS bagi pemuda	-	39.247.500	39.247.500
VI II	Program Pendidikan Menengah	6.278.607.735	6.338.960.235	60.352.500
	Pelatihan Guru olahraga untuk memenuhi standar kompetensi	-	60.352.500	60.352.500
XI	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	618.087.250	542.366.250	(75.721.000)
	5 Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN-SMA	125.721.000	15.000.000	(110.721.000)
	Pemasalah Olahraga tradisonal bagi pelajar	-	35.000.000	35.000.000
XI II	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.019.431.150	1.414.629.650	395.198.500
	2 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	182.590.000	113.603.000	(68.987.000)
	3 Pengendalian dan Pengawasan Penerapan Azaz Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan dana Dekonsentrasi dan dana Pembantuan	19.700.000	-	(19.700.000)
	Pelatihan komputer untuk tenaga administrasi sekolah	-	83.885.500	83.885.500
	Tambahan Pendamping DAK		400.000.000	400.000.000
2.	DINAS KESEHATAN	12.468.240.342	12.468.240.342	-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	711.240.405	723.090.405	11.850.000

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.950.000	7.400.000	(2.550.000)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.340.000	58.340.000	(1.000.000)
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.204.750	14.204.750	2.000.000
	13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	65.580.000	78.980.000	13.400.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		272.531.550	272.631.550	100.000
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56.105.000	55.105.000	(1.000.000)
	7	Pemeliharaan Rutin/Bekala Peralatan Gedung Kantor	2.948.000	4.048.000	1.100.000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		36.907.225	39.457.225	2.550.000
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.030.000	20.580.000	2.550.000
V	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		2.463.551.624	2.450.151.624	(13.400.000)
	2	Peingkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	236.698.325	223.298.325	(13.400.000)
VI	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		5.786.004.631	5.784.904.631	(1.100.000)
	7	Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan	1.789.982.500	1.788.882.500	(1.100.000)
IX	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		86.120.500	85.920.500	(200.000)
	3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	16.684.000	16.484.000	(200.000)
X	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		494.796.000	494.996.000	200.000
	2	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	40.620.000	40.420.000	(200.000)
	3	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	140.890.000	140.820.000	(70.000)
	4	Pencegahan Penularan Penyakit Edemik/Epidemik	102.300.000	101.220.000	(1.080.000)
	5	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	15.000.000	14.900.000	(100.000)
	6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	26.790.000	26.590.000	(200.000)
	7	Operasional Kegiatan PMK	81.417.000	83.267.000	1.850.000
XI	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya		1.391.756.772	1.391.756.772	-
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)		5.839.916.710	7.489.916.710	1.650.000.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		846.350.000	873.450.000	27.100.000
	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	211.350.000	213.450.000	2.100.000
	5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	75.000.000	100.000.000	25.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		98.415.300	133.415.300	35.000.000
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.700.000	16.700.000	5.000.000
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	56.715.300	71.715.300	15.000.000

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	30.000.000	15.000.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000.000	75.000.000	25.000.000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	75.000.000	25.000.000
VI II	Program Pengadaan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		1.312.758.000	1.372.553.000	59.795.000
	2	Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	150.900.000	191.400.000	40.500.000
		Pengadaan Alkes	-	4.220.000	4.220.000
		Perlengkapan RTRS	-	15.075.000	15.075.000
IX	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Ruma Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		344.062.410	1.847.167.410	1.503.105.000
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	100.000.000	100.000.000	-
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Modal Ambulance/Jenazah	57.284.700	114.784.700	57.500.000
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	50.000.000	171.123.600	121.123.600
		Lain-lain pemeliharaan		28.981.400	28.981.400
		Pengurangan dana operasional		(100.000.000)	(100.000.000)
		Bantuan Keuangan dari Provinsi		1.350.000.000	1.350.000.000
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM		45.322.914.393	45.972.469.793	(100.444.600)
I	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran		614.492.645	611.017.645	(3.475.000)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi	37.860.000	27.150.000	(10.710.000)
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	18.435.600	21.640.600	3.205.000
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.900.000	2.700.000	(1.200.000)
	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	295.170.000	300.400.000	5.230.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		778.846.292	775.161.292	(3.685.000)
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	90.953.500	91.853.500	900.000
	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	158.828.000	147.333.000	(11.495.000)
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000	28.870.000	3.870.000
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	59.384.792	61.424.792	2.040.000
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	6.000.000	1.000.000
II I	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		220.300.000	218.500.000	(1.800.000)
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	220.300.000	218.500.000	(1.800.000)
XI	Program Pengembangan dan Pegelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		5.713.149.600	5.711.109.600	(2.040.000)
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaaa Jaringan Irigasi	3.262.488.100	3.260.448.100	(2.040.000)

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
XI	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		5.531.519.683	6.192.075.083	(89.444.600)
	1	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan Pendamping PPIP	5.531.519.683	5.542.519.683	11.000.000
		Retensi		28.038.400	28.038.400
		TMDD		296.517.000	296.517.000
		Pengawasan Reka Ngalupolo		125.000.000	125.000.000
		Tambahan Operasional		200.000.000	200.000.000
		Pengurangan Dana Awal		(750.000.000)	(750.000.000)
5.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		3.290.597.000	3.390.597.000	100.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		166.179.500	176.179.500	10.000.000
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	66.550.000	76.550.000	10.000.000
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		70.775.000	45.150.000	(25.625.000)
	2	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.575.000	28.950.000	(25.625.000)
V	Program Pengembangan Data/Informasi		136.793.700	155.823.700	19.030.000
	2	Penyusunan Profil Daerah	44.293.700	63.323.700	19.030.000
VI	Program Kerjasama Pembangunan		928.198.950	933.248.950	5.050.000
	4	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga (Penelitian)	235.998.000	241.048.000	5.050.000
X	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		34.427.000	29.377.000	(5.050.000)
	1	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	34.427.000	29.377.000	(5.050.000)
XI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		563.860.500	590.232.500	26.372.000
	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	149.119.250	160.271.250	11.152.000
	6	Penyusunan KU-APBD,PPAS Perubahan TA.2010 & KU-APBD, PPAS Kab. Ende TA.2011	67.261.250	82.481.250	15.220.000
XI	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		234.439.500	260.064.500	25.625.000
	1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	110.324.000	135.949.000	25.625.000
XI	Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		150.000.000	194.598.000	44.598.000
	1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	150.000.000	94.598.000	(55.402.000)
		Tambahan		100.000.000	100.000.000
6.	DINAS PERHUBUNGAN		3.198.979.000	3.298.979.000	100.000.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		611.240.500	716.925.860	105.685.360
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.912.000	2.912.000	-
	11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	233.590.000	239.275.360	5.685.360
		Tambahan Operasional		100.000.000	100.000.000

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		226.410.380	233.410.380	7.000.000
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39.874.000	41.274.000	1.400.000
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	43.923.500	49.523.500	5.600.000
II I	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		59.450.000	51.304.970	(8.145.030)
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	59.450.000	51.304.970	(8.145.030)
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		22.300.000	23.359.670	1.059.670
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.300.000	23.359.670	1.059.670
V	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJR		73.141.120	67.541.120	(5.600.000)
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light	53.940.000	48.340.000	(5.600.000)
7.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		2.502.069.000	2.502.069.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		303.144.000	297.624.000	(5.520.000)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.480.000	21.960.000	(5.520.000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		416.070.000	421.590.000	5.520.000
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.025.000	18.545.000	5.520.000
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		204.200.000	204.200.000	-
	2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	23.195.000	28.560.000	5.365.000
	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	67.605.000	62.240.000	(5.365.000)
VI II	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		150.000.000	150.000.000	-
	1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	72.030.000	61.424.000	(10.606.000)
	2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	38.870.000	38.143.000	(727.000)
	3	Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah	39.100.000	50.433.000	11.333.000
8.	KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN		1.048.483.000	1.048.483.000	-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		180.629.000	124.829.000	(55.800.000)
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	125.510.000	65.960.000	(59.550.000)
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.440.000	9.190.000	7.750.000
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	16.700.000	12.700.000	(4.000.000)
IV	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.850.000	-	(1.850.000)
	1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.850.000	-	(1.850.000)
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		605.176.000	668.826.000	63.650.000

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	124.363.000	172.313.000	47.950.000
	6	Peningkatan Kemampuan Aparat Persampahan	34.600.000	46.450.000	11.850.000
	8	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	157.800.000	161.650.000	3.850.000
VI	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		30.860.000	24.860.000	(6.000.000)
	1	Pemeliharaan RTH	16.460.000	10.460.000	(6.000.000)
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		1.072.664.000	1.122.664.000	50.000.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		337.711.000	337.711.000	-
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.750.000	2.059.100	(690.900)
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.724.500	19.415.400	690.900
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		46.193.000	46.193.000	-
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.000.000	-	(5.000.000)
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	23.000.000	3.000.000
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	7.000.000	2.000.000
IV	Program Penataan Administrasi Keuangan		679.885.000	729.885.000	50.000.000
	1	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	292.970.000	342.970.000	50.000.000
10.	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA (BKBKS)		2.668.705.000	2.718.705.000	50.000.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		412.254.900	462.254.900	50.000.000
	12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	64.010.000	114.010.000	50.000.000
11.	DINAS SOSIAL		1.205.922.000	1.213.552.000	7.630.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		241.126.700	248.756.700	7.630.000
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	85.580.000	93.210.000	7.630.000
12.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		1.378.737.000	1.628.737.000	250.000.000
IV	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		406.537.500	656.537.500	250.000.000
	4	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, antar Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	250.000.000	250.000.000
16.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		893.497.000	893.497.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		295.517.500	317.117.500	21.600.000
	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	104.810.000	126.410.000	21.600.000
IV	Program Peningkatan Keamanan dan Kenamanan Lingkungan		252.000.000	230.400.000	(21.600.000)
	1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	252.000.000	230.400.000	(21.600.000)
17.	SEKRETARIAT DAERAH		9.686.853.318	10.716.853.318	1.030.000.000
	Bagian Hukum		303.165.000	378.165.000	75.000.000

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
IV	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		111.085.000	186.085.000	75.000.000
	2	Penyusunan/Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende	14.625.000	89.625.000	75.000.000
	Bagian Pembangunan		363.359.000	438.359.000	75.000.000
IV	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		262.200.000	337.200.000	75.000.000
	1	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	118.780.000	172.558.000	53.778.000
	2	Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	143.420.000	164.642.000	21.222.000
	Lain-lain Bagian				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5.183.025.888	5.183.025.888	595.000.000
		tambahan Bagian Umum		595.000.000	595.000.000
VI	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		361.375.000	361.375.000	85.000.000
		Rakor pamong Praja		85.000.000	85.000.000
VI II	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		47.775.000	97.775.000	50.000.000
	1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	47.775.000	97.775.000	50.000.000
X VI I	Program Peningkatan Peran serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan		75.000.000	100.000.000	150.000.000
		Tambahan Bagian Pemberdayaan Perempuan		25.000.000	25.000.000
		Tambahan Bagian Ekonomi		25.000.000	25.000.000
		Tambahan Bagian Orta		50.000.000	50.000.000
		Tambahan Bagian Humas		50.000.000	50.000.000
1 8	SEKRETARIAT DPRD		10.772.381.000	11.802.381.000	1.030.000.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.327.272.525	1.246.842.844	(80.429.681)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.200.000	208.059.874	(112.140.126)
	6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.120.000	21.400.000	(720.000)
	7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	68.160.000	59.760.000	(8.400.000)
	8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.000.000	104.000.000	35.000.000
	15	Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.827.900	12.658.345	5.830.445
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.019.258.475	1.038.605.158	19.346.683
	3	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	99.635.000	113.252.002	13.617.002
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	40.563.475	46.563.475	6.000.000
	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12.590.000	12.319.681	(270.319)
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		8.161.700.000	9.252.782.998	1.091.082.998
	1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.180.500.000	1.180.500.000	-

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	3	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	204.400.000	114.182.998	(90.217.002)
	4	Rapat-Rapat Paripurna	428.500.000	579.800.000	151.300.000
	7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.625.000.000	3.305.000.000	680.000.000
		Tambahan Operasional		350.000.000	350.000.000
19		DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6.876.275.000	6.876.275.000	150.000.000
V		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.461.505.000	4.461.505.000	150.000.000
		SPIP dan Bimtek Penyusunan Lap Keuangan		150.000.000	150.000.000
20		INSPEKTORAT	1.291.769.000	1.441.769.000	150.000.000
VI		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	20.016.975	170.016.975	150.000.000
	1	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Berkala	20.016.975	170.016.975	150.000.000
23		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH	792.719.000	800.719.000	8.000.000
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	363.536.000	371.536.000	8.000.000
	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	210.000.000	218.000.000	8.000.000
26		KECAMATAN ENDE SELATAN	453.040.000	432.190.000	-
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	288.288.500	264.482.500	(23.806.000)
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.000.000	15.000.000	1.000.000
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.000.000	18.500.000	2.500.000
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11.100.000	22.200.000	11.100.000
	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	79.660.000	41.254.000	(38.406.000)
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	143.901.500	120.057.500	(23.844.000)
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	18.500.000	37.000.000	18.500.000
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	37.334.000	17.097.500	(20.236.500)
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19.107.500	-	(19.107.500)
II I		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.400.000	40.200.000	40.200.000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	13.400.000	40.200.000	40.200.000
IV		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.450.000	7.450.000	7.450.000
	1	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	7.450.000	7.450.000	7.450.000
27		KECAMATAN ENDE TIMUR	270.368.000	270.368.000	-
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.601.000	126.796.500	(5.804.500)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.000	6.000.000	(1.800.000)

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000	750.000	(50.000)
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.457.500	7.178.500	(1.279.000)
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.358.500	3.318.000	(40.500)
	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.040.000	1.980.000	(60.000)
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	32.200.000	29.820.000	(2.380.000)
	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	37.830.000	37.820.000	(10.000)
	10	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.435.000	2.250.000	(185.000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		114.407.000	94.411.500	(19.995.500)
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	18.020.000	11.165.000	(6.855.000)
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11.150.000	3.500.000	(7.650.000)
	3	Pengadaan Meubeler	9.310.000	3.230.000	(6.080.000)
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.300.000	35.600.000	300.000
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	33.541.500	33.120.500	(421.000)
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.085.500	7.296.000	210.500
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	500.000	500.000
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		23.360.000	49.160.000	25.800.000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	23.360.000	49.160.000	25.800.000
2	KECAMATAN ENDE UTARA		291.691.000	291.691.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		156.763.500	157.241.500	478.000
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.300.000	9.550.000	(2.750.000)
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.500.000	920.900	(579.100)
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.848.750	8.655.850	3.807.100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		102.927.500	70.958.500	(31.969.000)
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	35.948.000	17.824.000	(18.124.000)
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.600.000	350.000	(6.250.000)
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	22.670.000	15.425.000	(7.245.000)
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	21.240.500	18.290.500	(2.950.000)
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8.017.000	10.617.000	2.600.000
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		27.500.000	58.991.000	31.491.000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	27.500.000	58.991.000	31.491.000

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
29	KECAMATAN PULAU ENDE		202.294.000	202.294.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		125.442.500	141.887.500	16.445.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	3.800.000	(1.000.000)
	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10.460.000	27.905.000	17.445.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		62.351.500	45.906.500	(16.445.000)
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	16.445.000	-	(16.445.000)
34	KECAMATAN DETUKELI		282.990.000	282.990.000	-
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		139.080.300	124.475.800	(14.604.500)
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.482.800	10.090.800	(3.392.000)
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	38.772.500	30.750.000	(8.022.500)
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	64.530.000	61.350.000	(3.180.000)
	10	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	510.000	500.000	(10.000)
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		120.549.700	117.339.200	(3.210.500)
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	15.125.000	15.125.000	-
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	31.783.500	25.423.000	(6.360.500)
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.500.000	8.500.000	-
	4	Pengadaan Mebeleur	7.300.000	10.450.000	3.150.000
II I.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		23.360.000	41.175.000	17.815.000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	23.360.000	41.175.000	17.815.000
37	KECAMATAN MAUROLE		290.254.000	290.254.000	-
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		216.201.550	208.201.550	(8.000.000)
	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12.160.000	32.620.000	20.460.000
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	128.460.000	100.000.000	(28.460.000)
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		56.702.450	56.702.450	-
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.960.000	13.460.000	2.500.000
	2	Pengadaan Mebeleur	8.460.000	7.525.000	(935.000)
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.906.000	4.341.000	(1.565.000)
II I.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		17.350.000	25.350.000	8.000.000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	17.350.000	25.350.000	8.000.000
40	KECAMATAN MAUKARO		391.452.000	391.452.000	-
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		189.689.500	199.009.500	9.320.000
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	300.000	150.000

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.000	900.000	(6.900.000)
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.850.000	2.500.000	650.000
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	1.790.000	3.810.000	2.020.000
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.500.000	500.000
	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	96.240.000	103.140.000	6.900.000
	11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.561.000	7.561.000	6.000.000
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		185.208.000	175.888.000	(9.320.000)
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	37.490.000	28.170.000	(9.320.000)
4 4	KECAMATAN NDORI		228.227.000	228.227.000	-
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		109.702.250	111.082.250	1.380.000
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.200.000	6.300.000	2.100.000
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000	1.260.000	(720.000)
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		105.624.750	104.894.750	(730.000)
	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14.650.000	14.100.000	(550.000)
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	8.000.000	3.000.000
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	39.747.750	37.627.750	(2.120.000)
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.667.000	6.607.000	(1.060.000)
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		900.000	250.000	(650.000)
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000	250.000	(650.000)
4 9	KELURAHAN PAUIRE		91.925.000	91.925.000	-
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		68.985.000	77.235.000	8.250.000
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.350.000	3.650.000	(10.700.000)
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5.330.000	24.280.000	18.950.000
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		20.990.000	12.740.000	(8.250.000)
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.250.000	-	(8.250.000)
5 1	KELURAHAN KOTA RAJA		91.925.000	91.925.000	-
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		59.665.000	76.032.000	16.367.000
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5.881.000	6.886.000	1.005.000
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.850.000	3.082.000	232.000
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.630.000	19.760.000	15.130.000
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		26.510.000	10.143.000	(16.367.000)

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.200.000	3.000.000	(17.200.000)
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.155.000	2.988.000	833.000
5	KELURAHAN TANJUNG				
6			91.925.000	78.375.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		47.285.000	52.560.000	5.275.000
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.650.000	3.100.000	1.450.000
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	3.300.000	4.625.000	1.325.000
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.400.000	4.400.000	-
	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	14.500.000	17.000.000	2.500.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		40.990.000	22.165.000	(18.825.000)
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2.717.000	2.717.000	-
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.360.000	9.160.000	800.000
	3	Pengadaan Meubeler	2.070.000	7.420.000	5.350.000
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	24.975.000	-	(24.975.000)
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		3.650.000	3.650.000	13.550.000
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.650.000	3.650.000	-
	2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	13.550.000	13.550.000
5	KELURAHAN ROWORENA				
7			91.925.000	91.925.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		76.910.000	65.530.000	(11.380.000)
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.118.000	2.029.000	(89.000)
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.900.000	1.150.000	(1.750.000)
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.300.000	3.800.000	(500.000)
	7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6.030.000	6.000.000	(30.000)
	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	40.000.000	31.000.000	(9.000.000)
	9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	736.500	725.500	(11.000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4.545.000	4.925.000	380.000
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.800.000	2.300.000	500.000
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.445.000	1.325.000	(120.000)
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.300.000	1.300.000	-
II	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur		7.500.000	18.500.000	11.000.000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	7.500.000	18.500.000	11.000.000

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
58	KELURAHAN ROWORENA BARAT		405.758.000	405.758.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		73.444.000	73.444.000	-
	6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5.800.000	10.950.000	5.150.000
	7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	29.050.000	23.900.000	(5.150.000)
60	KELURAHAN REWARANGGA SELATAN		94.590.420	94.590.420	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		50.775.420	52.575.420	1.800.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	894.000	594.000	(300.000)
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	8.550.420	6.250.420	(2.300.000)
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.400.000	8.800.000	4.400.000
	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	6.000.000	6.000.000	-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		40.065.000	38.265.000	(1.800.000)
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.790.000	8.990.000	(1.800.000)
62	KELURAHAN DETUSOKO		91.925.000	91.925.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		67.679.000	72.779.000	5.100.000
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12.100.000	11.600.000	(500.000)
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.229.000	7.199.000	(30.000)
	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6.030.000	12.060.000	6.030.000
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	21.200.000	20.800.000	(400.000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		21.006.000	15.906.000	(5.100.000)
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	6.000.000	-	(6.000.000)
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.500.000	12.500.000	-
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.966.000	2.866.000	900.000
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	540.000	540.000	-
II I.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		3.240.000	3.240.000	-
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.240.000	3.240.000	-
63	KELURAHAN BOKASAPE		91.925.000	91.925.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		74.855.000	85.705.000	10.850.000
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.391.000	6.705.900	(685.100)
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.600.000	3.486.750	(113.250)
	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.630.000	17.755.000	13.125.000
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam		31.700.000	

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
		Daerah	33.176.650		(1.476.650)
	10	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	516.100	516.100	-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		14.370.000	6.220.000	(8.150.000)
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.150.000	-	(8.150.000)
II I.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2.700.000	-	(2.700.000)
	1	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	2.700.000	-	(2.700.000)
6 5	KELURAHAN LOKOBOKO		91.925.000	91.925.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		58.167.000	67.097.000	8.930.000
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4.667.000	4.217.000	(450.000)
	8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.630.000	22.760.000	18.130.000
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	28.900.000	20.150.000	(8.750.000)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		31.408.000	22.478.000	(8.930.000)
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	19.615.000	19.615.000	-
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5.350.000	-	(5.350.000)
	3	Pengadaan Meubeler	3.905.000	825.000	(3.080.000)
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.538.000	2.038.000	(500.000)
II I.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2.350.000	2.350.000	-
	1	Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas	2.350.000	2.350.000	-
	2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	13.200.000	13.200.000
6 8	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN		1.651.934.000	1.678.934.000	27.000.000
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		390.128.700	410.346.100	20.217.400
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.922.600	23.140.000	(10.782.600)
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.300.000	4.500.000	(3.800.000)
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	38.375.000	46.175.000	7.800.000
		Honor Tenaga Penyuluh		27.000.000	27.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		126.228.850	133.011.450	6.782.600
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	34.655.000	32.755.000	(1.900.000)
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26.720.000	26.720.000	-
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.849.000	8.731.600	4.882.600
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	61.004.850	64.804.850	3.800.000

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
6 9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		3.112.766.000	2.997.766.000	(115.000.000)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		462.542.985	467.800.935	5.257.950
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	7.200.000	(4.800.000)
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.372.485	36.339.435	5.966.950
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.099.500	6.789.000	1.689.500
	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	221.070.000	213.436.500	(7.633.500)
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	131.165.000	141.200.000	10.035.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		114.704.765	110.429.765	(4.275.000)
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	17.974.000	17.974.000	-
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	51.095.000	46.820.000	(4.275.000)
IV	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		290.060.000	172.684.250	(117.375.750)
	1	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	115.000.000	-	(115.000.000)
	2	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan	86.060.000	83.684.250	(2.375.750)
	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	89.000.000	89.000.000	-
VI I	Program Pengembangan Wilayah Pedesaan		155.404.850	147.787.650	(7.617.200)
	1	Kegiatan Persiapan Pembentukan Desa Defenitif	88.521.350	24.540.000	(63.981.350)
	2	Kegiatan Pembentukan Desa Defenitif	66.883.500	123.247.650	56.364.150
VI II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	9.010.000	9.010.000
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kencrja SKPD	-	9.010.000	9.010.000
7 1	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		507.800.000	507.800.000	-
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		283.852.200	305.482.200	21.630.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.280.000	20.460.000	(2.820.000)
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40.272.000	35.292.000	(4.980.000)
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	88.880.000	118.310.000	29.430.000
II I	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		35.100.000	17.040.000	(18.060.000)
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.100.000	17.040.000	(18.060.000)
IV	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		46.053.850	44.643.850	(1.410.000)
	1	Akuisisi Arsip	28.133.850	28.133.850	-
	2	Pembinaan Arsip Masuk Desa	17.920.000	16.510.000	(1.410.000)
V	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		127.480.000	125.320.000	(2.160.000)

PROGRAM / KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN (Rp)		
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	46.800.000	44.640.000	(2.160.000)
7 2	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN		8.491.238.000	8.595.728.000	104.490.000
IX	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian		4.227.622.500	4.332.112.500	104.490.000
	1	Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian	3.927.622.500	4.027.622.500	100.000.000
		Retensi		4.490.000	4.490.000
7 3	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN		2.837.567.000	2.837.567.000	-
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		312.603.700	312.603.700	-
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.165.000	17.665.000	(500.000)
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.884.000	18.344.000	1.460.000
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.960.000	4.000.000	(960.000)
7 5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1.326.729.000	1.451.729.000	125.000.000
IX	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		78.995.000	203.995.000	125.000.000
	1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	21.475.000	146.475.000	125.000.000
7 7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		4.087.402.000	4.387.402.000	415.000.000
VI	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		1.468.544.500	1.768.544.500	415.000.000
	2	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	1.398.544.500	1.698.544.500	300.000.000
		Pengadaan alat tenun dan bengkel		115.000.000	115.000.000
		total	262.973.643.183	268.257.436.279	5.431.675.400

2. Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran Kegiatan

NO	URAIAN	LOKASI		PAGU (Rp)	SKPD
		Desa/Kel	Kecamatan		
1	Pembangunan rabat beton	Desa Wolomuku	Kec. Detukeli	100.000.000,00	PU
2	Pembangunan Deker dan rabat beton Jl. Magekoba-Kanganara	Desa Detukeli	Kec. Detukeli	50.000.000,00	
3	Pembangunan tembok penyokong lapangan bola kaki	Desa Wolofoe	Kec. Detusoko	100.000.000,00	PU
4	Pembangunan tembok pengaman kampung	Desa Turunalu	Kec. Detusoko	70.000.000,00	PU
5	Pembangunan rabat beton jln masuk ke Kapela Ranga	Desa Ranga	Kec. Detusoko	70.000.000,00	PU
6	Pembanguna rabat beton jln Desa Golulada	Desa Golulada	Kec. Detusoko	100.000.000,00	PU
7	Pembukaan jln baru Dusun Woloau	Desa Woloau	Kec. Detusoko	100.000.000,00	PU

NO	URAIAN	LOKASI		PAGU (Rp)	SKPD
		Desa/Kel	Kecamatan		
8	Pembukaan Jln ke SMAN 1 Detusoko	Kel Detusoko	Kec. Detusoko	95.000.000,00	PU
9	Pembangunan Rabat Setapak	Desa Wolomage	Kec. Detusoko	50.000.000,00	
10	Pembangunan Tembok Penyokong SMPK Wolotolo	Desa Wolotolo	Kec. Detusoko	50.000.000,00	
11	Pembangunan deker Niondori menuju permandian air panas kombandaru	Desa Riaraja	Kec. Ende	100.000.000,00	PU
12	Pembangunan tembok penyokong	Desa Tomberabu II	Kec. Ende	50.000.000,00	PU
13	Pembangunan rabat beton Tiwulande Puumbindi	Desa Tomberabu I	Kec. Ende	100.000.000,00	PU
14	Pembangunan Jln Dusun worombera	Desa Nakuramba	Kec. Ende	100.000.000,00	PU
15	Rehabilitasi jembatan gantung Onebare	Desa Emburia	Kec. Ende	75.000.000,00	PU
16	Pembangunan Jembatan Kojadhewa	Desa Rukuramba	Kec. Ende	450.000.000,00	PU
17	Pembangunan tembok penyokong dan pagar panti asuhan Walisongo	Kel. Tetandara	Kec. Ende Selatan	75.000.000,00	PU
18	Pembangunan tembok penyokong samping Aemuri	Kel. Tetandara	Kec. Ende Selatan	100.000.000,00	PU
19	Pembangunan tembok penyokong Jl Ikan Paus RT 06	Kel. Tanjung	Kec. Ende Selatan	50.000.000,00	PU
20	Pembangunan drainase di Boanawa		Kec. Ende Selatan	50.000.000,00	PU
21	Pembangunan saluran drainase RT 03/RW 01 Puunaka	Kel. Tanjung	Kec. Ende Selatan	50.000.000,00	PU
22	Pembangunan rabat beton lingkungan Waniwona	Kel. Tetandara	Kec. Ende Selatan	30.000.000,00	PU
23	Pembangunan rabat beton Jln setapak RT 02 Boanawa	Kel. Rukunlima	Kec. Ende Selatan	50.000.000,00	PU
24	Pembangunan rabat beton setapak Arubara	Kel. Tetandara	Kec. Ende Selatan	50.000.000,00	PU
25	Pembangunan rabat beton	Kel. Tanjung	Kec. Ende Selatan	100.000.000,00	PU
26	Pembangunan rabat beton Jln depan UD. Selamat Bhoanawa	Kel. Rukunlima	Kec. Ende Selatan	60.000.000,00	PU
27	Pembangunan rabat beton Jln masuk samping Toko Satu nusa dan pekuburan bel kantor lurah mbongawani	kel. Mbongawani	Kec. Ende Selatan	75.000.000,00	PU
28	Pembangunan rabat beton Jln lingkungan Karara dan wwona	Kel. Rukunlima	Kec. Ende Selatan	75.000.000,00	PU
29	Pembangunan Rabat setapak jalan ke pekuburan Islam Bhoanawa/Yety		Kec. Ende Selatan	50.000.000,00	PU
30	Pembangunan Jln setapak lingk. Pu'u Naka	Kel. Tanjung	Kec. Ende Selatan	30.000.000,00	PU
31	Pembangunan pagar lingkungan/gapura lingk Aewawi	Kel. Mbongawani	Kec. Ende Selatan	90.000.000,00	PU
32	Pembangunan rabat beton dan drainase Pupui	Kel. Rukun Lima	Kec. Ende Selatan	100.000.000,00	
33	rehabilitasi drainase samping toko Lancar Jl Kelimutu		Kec. Ende Tengah	50.000.000,00	PU

NO	URAIAN	LOKASI		PAGU (Rp)	SKPD
		Desa/Kel	Kecamatan		
34	Rehabilitasi drainase jln masuk SMAN I Ende		Kec. Ende Tengah	30.000.000,00	PU
35	rehabilitasi drainase jln Garuda	Kel. Potulando	Kec. Ende Tengah	75.000.000,00	PU
36	Rehabilitasi depan LP Jl. Samratulangi	Kel. Paupire	Kec. Ende Tengah	50.000.000,00	PU
37	Rehabitasi rabat beton lorong Napumere RT 04 RT 07	Kel. Paupire	Kec. Ende Tengah	100.000.000,00	PU
38	Pembangunan rabat beton jln masuk samping Masjid Jl baru Rt 05 rw 04	Kel. Paupire	Kec. Ende Tengah	100.000.000,00	PU
39	Pembangunan rabat jln lingkungan samping relay tv	Kel. Paupire	Kec. Ende Tengah	75.000.000,00	PU
40	Pemasangan pavin blok halaman Masjid Agung	Kel. Kelimutu	Kec. Ende Tengah	25.000.000,00	PU
41	Rehabilitasi jlnsetapak lorong SMA 1-SMPK Yos Soedarso		Kec. Ende Tengah	50.000.000,00	PU
42	Pembukaan jln baru samping bengkel bai dolo	Kel. Paupire	Kec. Ende Tengah	50.000.000,00	PU
43	Pembangunan rabat beton dan drainasi Jl Lorong BBK		Kec. Ende Tengah	100.000.000,00	PU
44	Pembangunan rabat beton RT 09, RW 04 Boafeo	kel. Rewarangga Selatan	Kec. Ende Timur	50.000.000,00	PU
45	Pembangunan jln setapak belakang MTS + lorong masjid Almuhajrijin Dinkes	Kel. Mautapaga	Kec. Ende Timur	100.000.000,00	PU
46	Pembangunan Rabat Beton jalan masuk Samping kantor DPC Gerindra	Kel Paupire	Kec. Ende Timur	100.000.000,00	PU
47	Pembangunan rabat beton jl masuk/setapak dan Saluran sampingApotik Rani	Kel. Mautapaga	Kec. Ende Timur	100.000.000,00	PU
48	Pembangunan rabat beton jln setapak permukiman samping kali mautapaga		Kec. Ende Timur	100.000.000,00	PU
49	Pembangunan rabat beton jln setapak	Desa Tiwu Tewa	Kec. Ende Timur	50.000.000,00	PU
50	Pembangunan rabat beton jln setapak PLTD II	Kel. Mautapaga	Kec. Ende Timur	50.000.000,00	PU
51	Pembangunan rabat beton dan drainase jln Kapela Arnoldus	kel. Rewarangga	Kec. Ende Timur	100.000.000,00	PU
52	Pembangunan rabat beton jln ke Gua Maria Gereja Roworeke		Kec. Ende Timur	75.000.000,00	PU
53	Pembangunan pagar pekuburan islam	Kel. Mautapaga	kec. Ende Timur	50.000.000,00	PU
54	Pembangunan Rabat Beton Jl masuk belakang kantor Bupati	Kel Mautapaga	Kec. Ende Timur	100.000.000,00	
55	Pembangunan rabat beton SDI Ende 11		Kec. Ende Utara	40.000.000,00	PU
56	Pembangunan pagar tembok belakang KBA Ndao		Kec. Ende Utara	25.000.000,00	PU
57	Pembangunan pagar tembok belakang SMA Muhamadiyah	Kel. Roworena Barat	Kec. Ende Utara	80.000.000,00	PU
58	Pembangunan tembok pengaman kampun Mbomba	Desa Gheoghoma	Kec. Ende Utara	100.000.000,00	PU

NO	URAIAN	LOKASI		PAGU (Rp)	SKPD
		Desa/Kel	Kecamatan		
59	Rehabilitasi drainase dalam kota, tembok Lingkungan Potu	Kel. Kota Raja	Kec. Ende Utara	100.000.000,00	PU
60	Rehabilitasi drainase perempatan Potu, dari arah masjid Matabale		Kec. Ende Utara	75.000.000,00	PU
61	Rabat beton halaman Masjid Babul fatah Ling Ambugaga III	Kel. Kota Raja	Kec. Ende Utara	40.000.000,00	PU
62	Pembangunan rabat beton RT 04, RW 06	Kel. Kota Ratu	Kec. Ende Utara	50.000.000,00	PU
63	Pembangunan rabat beton jln masuk ke Pekuburan Potu	Kel. Kota Raja	Kec. Ende Utara	50.000.000,00	PU
64	Pembangunan rabat beton (plat beton diatas saluran Lingk. Ambutonda	Kel. Kota raja	Kec. Ende Utara	100.000.000,00	PU
65	Lanjutan pembangunan rabat beton Dusun Woroja	Desa Gheoghoma	Kec. Ende Utara	75.000.000,00	PU
66	Pembangunan rabat beton jln menuju gua maria woronio		Kec. Ende Utara	100.000.000,00	PU
67	Pembangunan pagar Masjid Babul Fat Koposawu Embugaga 3	Kel. Kota Raja	Kec. Ende Utara	40.000.000,00	PU
68	Pembangunan pagar masjid	Desa Borokanda	Kec. Ende Utara	40.000.000,00	PU
69	Pembangunan rabat beton	Desa Woloara	Kec. Kelimutu	50.000.000,00	PU
70	Pembangunan rabat beton jln Detubu-wolokelo		Kec. Kelimutu	75.000.000,00	PU
71	Pembangunan rabat beton jln kampung wolokoli ke kampung kopobhobhe	Desa Woloara	Kec. Kelimutu	75.000.000,00	PU
72	Pembangunan jln Koanara-Jopu		Kec. Kelimutu	500.000.000,00	
73	Pembangunan rabat beton jalan tani	Desa Ranggalaka	Kec. Kotabaru	50.000.000,00	PU
74	Pembukaan jln baru Dusun Wolobheto		Kec. Lio Timur	80.000.000,00	PU
75	Pembangunan selokan pasangan kampung Puu Mbindi	Desa Kebirangga Tengah	Kec. Maukaro	100.000.000,00	PU
76	pembangunan rabat jln Kotakadhe	Desa Kebirangga	Kec. Maukaro	100.000.000,00	PU
77	Pembangunan /Rehabitasi sarana prasarana umum	Desa Watumite	Kec. Nangapanda	50.000.000,00	PU
78	Pembangunan tembok penyokong gereja	Desa Tendambepa	Kec. NAngapanda	75.000.000,00	PU
79	Pembangunan drainase depan lapangan sepak bola	Desa Raporendu	kec. Nangapanda	75.000.000,00	PU
80	Pembangunan setapak masuk SMPN 5	Nangamboia	Kec. Nangapanda	100.000.000,00	PU
81	Pembangunan rabat jln Kuberu-worowona- tiwe	Desa Ndururea	Kec. Nangapanda	100.000.000,00	PU
82	Pembangunan Jalan Dusun Puuwaru-Tiwe	Desa Ndururea	Kec. Nangapanda	100.000.000,00	PU
83	Pengamanan/bronjongnisasi kantor paroki nangapanda		Kec. Nangapanda	50.000.000,00	PU
84	Pembangunan rabat lorong RT Watumbawu	Kel. Lokoboko	Kec. Ndona	50.000.000,00	PU
85	Pembangunan rabat beton	Desa Nangesa	Kec. Ndona	100.000.000,00	PU

NO	URAIAN	LOKASI		PAGU (Rp)	SKPD
		Desa/Kel	Kecamatan		
86	Pembangunan Pagar Tembok Gereja Wolotopo	Desa Wolotopo	Kec. Ndona	50.000.000,00	PU
87	Pembangunan tembok Penyokong Kantor BPP Ndona (kompleks Kantor Kec)	Desa Nanganesa	Kec. Ndona	50.000.000,00	
88	Pembangunan tembok pengaman kampung Keudoa		Kec. Ndona Timur	50.000.000,00	PU
89	Pembangunan tembok penyokong	Desa Kurulimbu	Kec. Ndona Timur	100.000.000,00	PU
90	Pembangunan tembok penyokong lapangan	Desa Demulaka	Kec. Ndona Timur	75.000.000,00	PU
91	Pembukaan Jln Desa Kurulimbu ke kurulimbu Selatan		Kec. Ndona Timur	100.000.000,00	
92	Pembukaan Jln Dusun Lele-Duli,	Desa Kurulimbu Selatan	Kec. Ndona Timur	65.000.000,00	
93	Lanjutan rehabilitasi jaringan air bersih Dusun Lunngaria	Desa Wonda	Kec. Ndori	100.000.000,00	PU
94	lanjutan pembangunan/pemasangan jaringan pipa air bersih	Desa Mole	Kec. Ndori	600.000.000,00	PU
95	Pembangunan tembok pengaman kampung Hobatua	Desa Maubasa Timur	Kec. Ndori	95.000.000,00	PU
96	Pembangunan tembok pengaman abrasi	Desa Rendorateru	Kec. Pulau Ende	100.000.000,00	PU
97	Pembangunan tembok penahan abrasi pantai Dusun Meti Numba	Desa Ndoriwoi	Kec. Pulau Ende	70.000.000,00	PU
98	Pembangunan rabat Jln lingkungan Nuaseko I	Desa mautenda	Kec. Wewaria	100.000.000,00	PU
99	Pembukaan Jln baru: Numba-Mautenda barat		Kec. Wewaria	50.000.000,00	PU
100	Pembangunan jaringan air untuk peternakan sapi padang lewa	Desa Mukusaki	Kec. Wewaria	100.000.000,00	PU
101	Rehabilitasi/peningkatan jaringan air minum Dusun Kolokamba	Desa Mautenda	Kec. Wewaria	50.000.000,00	PU
102	Pembangunan tembok penahan tanah SDK Numba		Kec. Wewaria	50.000.000,00	PU
103	Pembangunan rabat beton Dusun Aemuri	Desa Aemuri	Kec. Wewaria	80.000.000,00	PU
104	Pembangunan rabat beton jalan tani Kampung Nua baru Lowodagha	Desa Tanali	Kec. Wewaria	50.000.000,00	PU
105	Pembangunan rabat beton jalan tani Aegana Molutangga		Kec. Wewaria	100.000.000,00	PU
106	pembangunan rabat Jln Dusun Detuboro	Desa Welamosa	Kec. Wewaria	100.000.000,00	PU
107	Pembangunan rabat Jln lingkungan	Desa Mbotulaka	Kec. Wewaria	50.000.000,00	PU
108	Pembangunan Jln ling. Dusun Anaranda II	Desa Mautenda	Kec. Wewaria	80.000.000,00	PU
109	Pembangunan peningkatan/pemeliharaan Jalan desa Fataatu timur		Kec. Wewaria	100.000.000,00	PU
110	Pembangunan Irigasi Liawaja	Desa Mautenda barat	Kec. Wewaria	50.000.000,00	

NO	URAIAN	LOKASI		PAGU (Rp)	SKPD
		Desa/Kel	Kecamatan		
111	Pembangunan Rabat Beton Dusun Nuaseko III	Desa Mautenda	Kec. Wewaria	70.000.000,00	
112	Pembangunan rabat beton dusun Gai Gajo	Desa Nggela	Kec. Wolojita	100.000.000,00	PU
113	Peningkatan ruas jln Desa Nuamulu ke Ngaluroga		Kec. Wolojita	75.000.000,00	PU
114	Pembangunan drainase kampung Oto au Rt 02	Kel. Bokasape	Kec. Wolowaru	50.000.000,00	PU
115	Pembangunan tembok penyokong Dusun Nggaja	Desa Mbuli Lo'o	Kec. Wolowaru	50.000.000,00	PU
116	Pembangunan drainase Dusun AB	Desa Wolokoli	Kec. Wolowaru	95.000.000,00	PU
117	Pembangunan drainase dan plat deker	Kel. Bokasape	Kec. Wolowaru	50.000.000,00	PU
118	Pembangunan drainase lingkungan Nuawolo	Desa Mbuli	Kec. Wolowaru	50.000.000,00	PU
119	Pembangunan rabat beton jalan masuk MAS		Kec. Wolowaru	85.000.000,00	PU
120	Pembangunan rabat beton jln Woloboa	Desa Rindiwawo	Kec. Wolowaru	100.000.000,00	PU
121	Pembangunan rabat beton jln Ledasu'a Wolomage	Desa Bokasape Timur	Kec. Wolowaru	100.000.000,00	PU
122	Pembangunan rabat beton jln Dusun watubewa	Desa Rindiwawo	Kec. Wolowaru	50.000.000,00	PU
123	Pembangunan rabat beton jln menuju Desa Niramesi	Desa Niramesi	Kec. Wolowaru	80.000.000,00	PU
124	Pembangunan Irigasi	Kel. Bokasape	Kec. Wolowaru	100.000.000,00	PU
125	Pembangunan Irigasi lingkungan Detuhi	Kel. Bokasape	Kec. Wolowaru	100.000.000,00	PU
126	Pembangunan Irigasi RT 07/RW 03 belakang toko Aneka Ria	Kel. Bokasape	Kec. Wolowaru	100.000.000,00	PU
127	Pembangunan Irigasi RT 09	Kel. Bokasape	Kec. Wolowaru	100.000.000,00	PU
128	Rehabilitasi pipa air minum	Desa Rindiwawo	Kec. Wolowaru	100.000.000,00	PU
129	Pengadaan Mebeler / Alat-alat Permainan Kober	Ndetundora, Tinabani	Ende	25.000.000	PPO
130	Rehabilitasi Gedung SDK Wolokota	Wolokota	Ndona	100.000.000	Dinas PPO
131	Rehabilitasi Ruang Laboraturium SMAN Nangapanda	Ndorurea	Nangapanda	100.000.000	Dinas PPO
132	Pengadaan Alat Peraga Edulatif Untuk Kelompok Bermain Ar-Rahman Ipi	Tetandara	Ende Selatan	10.000.000	Dinas PPO
133	Pembangunan Pagar SMA Alsiora	Paupire	Ende Selatan	100.000.000	Dinas PPO
134	Pembangunan Pagar SMP Muhamadiyah Ende	Kotaratu	Ende Utara	50.000.000	Dinas PPO
135	Pembangunan pagar tembok SDI Jopu 4	Wolokoli	Wolowaru	70.000.000	Dinas PPO
136	Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Mana Jawa	Tonggopapa	Ende	100.000.000	Distanak
137	Pengadaan Mebeler Polindes / Pustu Desa Kekasewa dan Desa Nila	Nila	Ndona	50.000.000	Dinkes

NO	URAIAN	LOKASI		PAGU (Rp)	SKPD
		Desa/Kel	Kecamatan		
138	Pembangunan Pagar Keliling Polindes Lokoboko Kec. Ndona	Lokoboko	Ndona	85.480.000	Dinkes
139	Pembangunan Pagar Keliling Pustu Dile Kec. Detusoko	Dile	Detusoko	78.000.000	Dinkes
140	Pembangunan Pagar Keliling Pustu Ekoleta	Wologai Tengah	Detusoko	80.200.000	Dinkes
141	Pembangunan Pagar Keliling Pustu Niowula	Niowula	Detusoko	80.200.000	Dinkes
142	Pembangunan Pagar Keliling Pustu Nduaria	Nduaria	Kelimutu	80.200.000	Dinkes
143	Pembangunan Pagar Keliling Pustu Mbuliwaralau	Mbuliwaralau	Wolowaru	88.200.000	Dinkes
144	Pembangunan Pagar Keliling Pustu Wolosoko	Wolosoko	Wolowaru	80.200.000	Dinkes
145	Pembangunan Pagar Keliling Polindes Mbuliwaralau	Mbuliwaralau	Wolowaru	88.000.000	Dinkes
146	Pembangunan TPT dan Pagar Pustu, Desa Rateroru	Rateroru	Detusoko	70.000.000	Dinkes

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penjabarannya memerlukan langkah-langkah taktis strategis, yang dituangkan dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

1. Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam RKPD dan Perubahannya, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD, Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2012 ini selanjutnya perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Ende tahun 2012;
3. Perubahan RPKD Kabupaten Ende Tahun 2012 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2012, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Semoga Perubahan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Ende Tahun 2012 ini, dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya, menuju MASYARAKAT ENDE LIO SARE PAWE.

BUPATI ENDE,

DON BOSCO M. WANGGE